



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAKIM
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 444471

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 935.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 4740 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 4030 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 120.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
7. Tanah Seluas 2590 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 121.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000



3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.844.522
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.184.544.522
III. HUTANG	Rp.	240.625.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	943.919.522

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.